BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelaporan keuangan adalah proses mengkomunikasikan informasi akuntansi keuangan tentang perusahaan kepada pengguna internal dan eksternal. Karakteristik penting dari akuntansi adalah identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi keuangan tentang entitas ekonomi dan pihak yang berkepentingan. Akuntansi keuangan adalah proses yang berujung dalam penyusunan laporan keuangan pada perusahaan untuk digunakan oleh pihak internal dan eksternal. Pengguna laporan keuangan meliputi investor, kreditor, manajer, serikat pekerja, dan lembaga pemerintah. Laporan keuangan adalah sarana utama di mana perusahaan mengkomunikasikan informasi keuangan kepada orang-orang luar (Kieso, Weygrant, Warfield, 2009:4).

Perkembangan perekonomian yang pesat, dewasa ini sering diwarnai dengan ketidak pastian dengan masa yang akan datang, maka dituntut adanya perencanaan yang matang pada semua aspek perusahaan tidak terkecuali pada aspek yang berkaitan dengan kebijakan keuangan (Ratna Ningsih Puji Rahayu, 2009:15). Indikator keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, akan tetapi laba suatu perusahaan tidak mencerminkan jumlah kas yang ada di perusahaan (Parlindungan, 2009:60).

Laba merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan

kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004:70).

Dari pendapat tersebut dapat di ketahui bahwa Laba merupakan pendapatan bersih yang dilihat dari selisih antara pendapatan total perusahaan dengan biaya totalnya. Besarnya laba dapat dilihat dari laporan laba rugi perusahaan yang menunjukkan sumber dari mana penghasilan diperoleh serta beban yang dikeluarkan sebagai beban perusahaan. Perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila penghasilan yang diperoleh lebih besar dari beban yang dikeluarkan dan dikatakan rugi apabila sebaliknya.(Kusnadi at al. 2004).

Sebuah kumpulan informasi memberikan deskripsi dan dipilah berdasarkan informasi yang berkaitan dengan item yang termasuk dalam laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas), serta mereka yang tidak muncul dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan karena persyaratan IFRS (Ali Mirza, Orrell, Holt, 2008:13).

Adopsi standar akuntansi yang mengharuskan informasi berkualitas tinggi, transparan, dapat diperbandingkan diterima dengan tangan terbuka oleh i*nvestor*, kreditor, dan analis keuangan, dan pengguna laporan keuangan lainnya. Sulit untuk membandingkan informasi keuangan seluruh dunia, tanpa seperangkat standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang umum. Penggunaan seperangkat standar akuntansi berkualitas tinggi akan memberikan fasilitas investasi dan pengambilan keputusan ekonomis lainnya melewati lintas batas, meningkatkan efisisensi pasar, dan mengurangi biaya untuk peningkatan modal. Standar pelaporan keuangan internasional (IFRS) semakin menjadi perangkat standar

akuntansi yang diterima secara global yang memenuhi kebutuhan dunia (Ankarath, Ghosh, Mehta, and Alkafaji, 2010:2).

Standar akuntansi yang berkualitas sangat penting untuk pengembangan kualitas struktur pelaporan keuangan global. Standar akuntansi yang berkualitas terdiri dari prinsip-prinsip komprehensif yang netral, konsisten, sebanding, relevan dan dapat diandalkan yang berguna bagi investor, kreditor dan pihak lain untuk membuat keputusan alokasi modal (SEC:2000).

Globalisasi pasar modal telah dibarengi dengan panggilan untuk globalisasi pelaporan keuangan. Oleh karena itu, Sarbanes-Oxley Act of 2002 telah merekomendasikan konvergensi akuntansi keuangan global sebagai sarana meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memberikan kontribusi terhadap kepercayaan investor pada perusahaan publik. Bagi perusahaan yang menerapkan standar akuntansi baru kemungkinan suatu langkah besar, terutama jika standar akuntansi lokal berbeda secara signifikan dari standar global. Dalam keadaan ini kebutuhan akan sumber daya yang cukup, pelatihan, dedikasi, komunikasi dan persiapan pemerintah lokal, manajer dan auditor yang diperlukan (Schadewitz, Vieru:2008).

IAS dan IFRS adalah standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang merupakan produk IASC dan IASB. IFRS adalah produk IASB versi baru, sedangkan IAS adalah produk IASC versi lama (purba, 2010:4).

Penerapan IFRS memiliki pengaruh yang sangat besar pada perusahaan yaitu memberikan informasi mengenai posisi, kinerja keuangan dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi segenap lapisan pengguna

dalam melakukan pengambilan keputusan ekonomi, seperti apakah seorang investor ingin menjual atau menahan suatu investasi dalam suatu entitas, atau karyawan yang menilai kemampuan suatu entitas untuk memberikan tunjangan kepadanya (Ankarath, Ghosh, Mehta, and Alkafaji, 2010:16)

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standar Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC). *International Accounting Standar Board* (IASB) yang dahulu bernama *International Accounting Standar Committee* (IASC), merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan (Purba, 2010:4).

Penerapan standar yang membutuhkan informasi berkualitas tinggi, transparan, dan dapat dibandingkan disambut oleh para investor, kreditur, analis keuangan, dan pengguna laporan keuangan lainnya. Tanpa standar umum, sulit untuk membandingkan informasi keuangan yang disiapkan oleh entitas yang terletak di berbagai belahan dunia. Dalam perekonomian yang semakin global, penggunaan satu set standar akuntansi berkualitas tinggi memfasilitasi investasi dan keputusan ekonomi lainnya melintasi perbatasan, meningkatkan efisiensi pasar, dan mengurangi biaya peningkatan modal. IFRS semakin menjadi set

standar akuntansi yang diterima secara global yang memenuhi kebutuhan dunia yang semakin terintegrasi pasar modal global (Ali Mirza, Orrell, Holt, 2008:2).

Akuntansi untuk kontrak asuransi di bawah standar internasional yang ditetapkan oleh IFRS 4, yang merupakan penyelesaian tertunda sementara standar proyek asuransi yang saat ini dilakukan oleh IASB dan FASB. IFRS 4 memungkinkan berbagai praktek akuntansi untuk kontrak asuransi. Akibatnya, hal itu memungkinkan perusahaan untuk terus menggunakan prinsip akuntansi sebelumnya (negara tertentu), suatu subyek dari beberapa penyesuaian. Ketentuan utama IFRS 4 dibahas selanjutnya. IFRS 4 berlaku untuk hampir semua kontrak asuransi dan reasuransi, baik tertulis oleh perusahaan asuransi yang terdaftar atau tidak. Hal ini berbeda dengan US GAAP yang umumnya berlaku untuk asuransi saja. IFRS 4 mendefinisikan kontrak asuransi sebagai "sebuah kontrak di mana satu pihak (perusahaan asuransi) menerima risiko asuransi signifikan dari pihak lain (pemegang polis) dengan menyetujui untuk mengkompensasi pemegang polis jika kejadian tidak pasti tertentu (kejadian yang diasuransikan) berdampak merugikan pemegang polis". Definisi ini berfokus pada substansi transaksi ekonomi daripada bentuk hukumnya. Mirip dengan US GAAP, definisi ini berarti bahwa kontrak reasuransi keuangan tertentu dan kebijakan dengan rendahnya transfer risiko (misalnya risiko tertentu yang terbatas kontrak) tidak memenuhi definisi kontrak asuransi dan oleh karena itu harus dicatat sebagai deposito. IFRS 4 memerlukan informasi kuantitatif dan kualitatif rinci untuk membantu pengguna memahami jumlah dalam laporan keuangan perusahaan asuransi dan risiko yang timbul dari kontrak asuransi, termasuk pengungkapan mengenai kebijakan

akuntansi, asumsi yang paling signifikan, tujuan manajemen risiko dan kebijakan, serta syarat dan ketentuan kontrak asuransi yang memiliki dampak material pada jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan asuransi (Doron Nissim, 2010:89).

Istilah *Risk-Based Capital* telah menjadi penting, khususnya berkaitan dengan pengukuran keamanan finansial atau kesehatan perusahaan-perusahaan asuransi. Regulasi pemerintah berdasarkan RBC mengenai kesehatan perusahaan-perusahaan asuransi diluncurkan ke industri asuransi di Indonesia oleh Pemerintah setempat di tahun 1999. Beberapa perusahaan asuransi sekarang telah berada dibawah pengawasan khusus Pemerintah karena rasio kesehatan RBC mereka tidak memenuhi ketentuan minimum Pemerintah. Secara umum, rasio kesehatan RBC adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan finansial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi. Semakin besar rasio kesehatan RBC sebuah perusahaan asuransi, semakin sehat kondisi finansial perusahaan tersebut. Rasio kesehatan RBC suatu perusahaan asuransi pada dasarnya adalah rasio dari nilai kekayaan bersih atau "*net worth*" perusahaan bersangkutan, yang dihitung berdasarkan peraturan akuntasi standar, dibagi dengan nilai kekayaan bersih, yang dihitung kembali dengan mengikutsertakan resiko-resiko pemburukan yang mungkin terjadi. Pengikutsertaan resiko-resiko pemburukan yang mungkin tersebut merefleksikan adanya ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dalam aktivitas sehari-harinya, misalkan saja kemungkinan jatuhnya nilai aset secara jangka pendek akibat investasi pada instrumen yang lebih beresiko, demikian pula kemungkinan naiknya tingkat hutang akibat perkembangan yang

tidak menguntungkan di masa depan dalam hal tingkat suku bunga, tingkat kematian, tingkat putus kontrak, dan lain sebagainya. Nilai kekayaan bersih yang ke dua, sebagai penyebut dari rasio tersebut, sebenarnya merupakan besaran yang semula disebut sebagai *Risk Based Capital*, karena berupakan besaran nilai kekayaan bersih, atau *Capital*, yang dihitung secara *Risk Based* (Allianz.com).

Latar belakang diberlakukannya konsep *Risk Based Capital* adalah karena perusahaan asuransi biasanya menghitung resiko dari besarnya kewajiban saja, padahal resiko juga menyangkut kekayaan yang di investasikan. Salah satu contoh adalah saham atau deposito. Karena bunga deposito berfluktuasi maka diperlukan perhitungan teknis agar pengelola asuransi dapat melihat setiap saat mengenai resiko atas kekayaan yang diinvestasikan (ludovicus sensi:2006).

Risk Based Capital (RBC) adalah ukuran yang diadopsi oleh NAIC dan disahkan oleh negara untuk menentukan modal wajib minimum dan persyaratan surplus asuransi. Rumus *Risk-Based Capital* digunakan oleh regulasi otoritas negara untuk mengidentifikasi perusahaan asuransi yang mungkin kekurangan modal dan perusahaan asuransi yang membutuhkan perhatian menurut regulasi. Rasio surplus perusahaan pemegang polis yang sebenarnya untuk persyaratan modal minimum yang menentukan apakah peraturan pelaksana negara yang diperlukan. *Insurers* memiliki modal disesuaikan total kurang dari yang dibutuhkan oleh perhitungan RBC ini tergantung pada berbagai tingkat peraturan pelaksana tergantung pada tingkat ketidakmampuan modal (Doron Nissim, 2010:32).

Metode Risk Based Capital pada dasarnya merupakan sistem yang membuat perusahaan bisa menyesuaikan modal dengan mempertimbangkan resiko investasi dan kemampuan modal yang dimiliki oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan (Ludovicus Sensi, 2006:159).

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Julian Noor menjelaskan sebanyak 70 persen dari 84 perusahaan asuransi umum/kerugian atau sekitar 60 perusahaan menyatakan belum siap untuk menerapkan Penerapan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) 62 atau *International Financial Reporting Standard* (IFRS) no. 4. Sehingga AAUI meminta untuk menunda aturan IFRS tersebut. Pertimbangan asosiasi yang menginginkan permohonan penundaan adalah PSAK 62 belum sepenuhnya dipahami khususnya terkait perhitungan cadangan teknis dengan metode *gross premium valuation*. Karena dengan penyajian cadangan teknis yang semula dilakukan dengan pendekatan *netto* menjadi *gross.* Ini akan membuat baik aset maupun kewajiban meningkat, sehingga bisa mengganggu solvabilitas, RBC mepet, modal mepet, akibatnya bisa tidak *solvent*. Tergerusnya ekuitas dan penurunan solvabilitas yang sangat signifikan ini juga disebabkan faktor keterbatasan SDM, modal, sistem informasi teknologi di masing-masing perusahaan. Akibat tidak terpenuhinya pesyaratan modal minimum akan membawa dampak ekonomi seperti Pembatasan Kegiatan Usaha (Kompas.com).

Muljono Tjandra juga mengungkapkan Penerapan International Financial reporting Standard (IFRS) no. 4 dalam hal perhitungan pendapatan premi berpotensi menurunkan rasio solvabilitas (*risk based capital*/RBC) perusahaan

asuransi umum. Sebab, komponen premi reasuransi (premi asuransi yang dilimpahkan ke perusahaan reasuransi) yang selama ini dihitung nilai retensinya saja (premi bruto dikurangi premi reasuransi), di dalam pelaporan IFRS dihitung secara bruto. Dalam IFRS, premi reasuransi nantinya akan dihitung secara bruto dengan istilah utang reasuransi, sehingga bisa menambah nominal di liabilitas. Sementara itu, dari sisi *asset*, premi reasuransi dihitung secara bruto dengan nama piutang reasuransi. Apabila, liabilitas lebih tinggi dibanding *asset* dengan adanya IFRS, tentunya RBC bisa menurun bahkan minus. Perolehan laba perusahaan asuransi juga akan berpengaruh. Sebab, komponen pembentukan laba perusahaan asuransi juga akan berpengaruh. Sebab, komponen pembentuk laba yaitu hasil *underwriting* dimasukkan dalam komponen di luar klaim terjadi yang belum dilaporkan (*incurred but not reporting*/IBNR). Selain itu, lanjut Muljono terdapat perhitungan cadangan klaim yang dihitung secara *actuary* dan *historical* alias ada perhitungan dalam tahun berjalan dalam saat ini. Perhitungan cadangan klaim yang baru tersebut tentunya bisa mempengaruhi hasil *underwriting* sebagai pembentuk hasil investasi dan laba (www.asuransi.adira.co.id).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil penelitian dengan judul : **"Pengaruh Perhitungan Pendapatan Premi Berdasarkan PSAK 62 (Kontrak Asuransi) terhadap *Risk-Based Capital* dan Dampaknya Pada Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Asuransi Kerugian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)"**.

1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sebanyak 70 persen dari 84 perusahaan asuransi umum atau sekitar 60 perusahaan menyatakan belum siap untuk menerapkan Penerapan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) 62 atau *International Financial Reporting Standard* (IFRS) no. 4. Sehingga AAUI meminta untuk menunda aturan IFRS tersebut. PSAK 62 belum sepenuhnya dipahami khususnya terkait perhitungan cadangan teknis dengan metode *gross premium valuation*. Karena dengan penyajian cadangan teknis yang semula dilakukan dengan pendekatan netto menjadi gross. Ini akan membuat baik aset maupun kewajiban meningkat, sehingga bisa mengganggu solvabilitas, RBC mepet, modal mepet, akibatnya bisa tidak solvent. Tergerusnya ekuitas dan penurunan solvabilitas yang sangat signifikan ini juga disebabkan faktor keterbatasan SDM, modal, sistem informasi teknologi di masing-masing perusahaan. Akibat tidak terpenuhinya pesyaratan modal minimum akan membawa dampak ekonomi seperti Pembatasan Kegiatan Usaha, hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada.
2. Penerapan *International Financial reporting Standard* (IFRS) 4 berpotensi menurunkan rasio solvabilitas (*risk based capital*/RBC) perusahaan asuransi umum. Sebab, komponen premi reasuransi (premi

asuransi yang dilimpahkan ke perusahaan reasuransi) yang selama ini dihitung nilai retensinya saja (premi bruto dikurangi premi reasuransi), di dalam pelaporan IFRS dihitung secara bruto. Dalam IFRS, premi reasuransi nantinya akan dihitung secara bruto dengan istilah utang reasuransi, sehingga bisa menambah nominal di liabilitas. Sementara itu, dari sisi *asset*, premi reasuransi dihitung secara bruto dengan nama piutang reasuransi. Apabila, liabilitas lebih tinggi dibanding *asset* dengan adanya IFRS, tentunya RBC bisa menurun bahkan minus. Perolehan laba perusahaan asuransi juga akan berpengaruh, hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh Perhitungan Pendapatan Premi Berdasarkan PSAK 62 (Kontrak Asuransi) terhadap *Risk-Based Capital* Pada Perusahaan Asuransi Kerugian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Seberapa besar pengaruh *Risk-Based Capital* terhadap Laba Perusahaan Asuransi Kerugian Pada Perusahaan Asuransi Kerugian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Seberapa besar pengaruh Perhitungan Pendapatan Premi Berdasarkan PSAK 62 (Kontrak Asuransi) terhadap *Risk Based Capital* dan Dampaknya pada Laba Perusahaan Asuransi Kerugian Pada Perusahaan Asuransi Kerugian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mencari data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui dan memperoleh pengetahuan yang jelas tentang Pengaruh Perhitungan Pendapatan Premi Berdasarkan PSAK 62 (Kontrak Asuransi) terhadap *Risk-Based Capital* dan Dampaknya pada Laba Perusahaan Asuransi Kerugian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Seperti yang telah di sebutkan dalam Latar Belakang Penelitian, Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besar pengaruh Perhitungan Pendapatan Premi Berdasarkan PSAK 62 (Kontrak Asuransi) terhadap *Risk-Based Capital* Pada Perusahaan Asuransi Kerugian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui besar pengaruh *Risk-Based Capital* terhadap Laba Perusahaan Asuransi Kerugian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui besar pengaruh Perhitungan Pendapatan Premi Berdasarkan PSAK 62 (Kontrak Asuransi) terhadap *Risk Based Capital* dan Dampaknya pada Laba Perusahaan Asuransi Kerugian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Peneliti melalui penelitian ini berharap dapat memberikan kegunaan, adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah tentang Pengaruh Perhitungan Pendapatan Premi terhadap *Risk Based Capital* dan dampaknya pada laba perusahaan asuransi kerugian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. serta sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktek nyata di perusahaan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan ilmu akuntansi, memberikan referensi tentang keterkaitan antara Pengaruh Perhitungan Pendapatan Premi terhadap *Risk Based Capital* dan dampaknya pada laba perusahaan asuransi kerugian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagi civitas akademika, dapat menambah informasi sumbangan pemikiran dan kajian dalam penelitian Pengaruh Perhitungan Pendapatan Premi terhadap *Risk Based Capital* dan dampaknya pada laba perusahaan asuransi kerugian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Perusahaan Asuransi Kerugian yang terdaftar di BEI tahun 2012. Waktu penelitian akan dilakukan dari awal bulan September 2012 s.d Agustus 2013.

1.5.2 Waktu Penelitian

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

Kegiatan	2012-2013											
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Pra Survei:												
1. Persiapan Judul												
2. Persiapan Teori												
3. Pengajuan Judul												
4. Mencari Perusahaan												
Usulan Penelitian:												
1. Penulisan UP												
2. Bimbingan UP												
3. Seminar UP												
4. Revisi UP												
Pengumpulan Data												
Pengolahan Data												
Penyusunan Skripsi:												
1. Bimbingan Skripsi												

2. Sidang Skripsi												
3. Pengumpulan Draf Skripsi												